



Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1

Halaman:

1	2	3	4	5
				✓

4 Bulan Justiar Benahi Disclaimer

Raih WDP BPK, DPRD Apresiasi

TOBOALI - Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan (Pekab Basel) mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Bangka Belitung (Babel) terhadap anggaran tahun 2015 lalu.

Selain itu, BPK RI Babel juga memberikan catatan khusus kepada Pekab Basel yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah 17 temuan kelebihan dan kekurangan dalam pembayaran, serta masalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Bangun Basel dan aset-aset lainnya.

"Ada 17 temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), jangka waktu untuk melakukan perbaikan selama 60 hari kedepan harus segera selesai dibenahi atas temuan BPK itu, jangan sampai ada lagi kerugian negara yang ditemukan," ujar Bupati Basel, Drs H Justiar Noer ST, MM, MSI kepada wartawan, Senin (18/7) siang usai dari acara halal bi halal di pendopo rumah dinas.

Terkait temuan BPK tersebut, Justiar merencanakan Selasa (19/7) ini segera dilakukan rapat dan bahas bersama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). "Selasa, (19/7) kita bahas bersama terkait temuan BPK itu, apakah fisiknya yang akan dibenahi atau administrasinya. Belum tahu SKPD mana saja yang banyak temuan," jelasnya seraya menjelaskan Pekab Basel mendapatkan predikat WDP, karena salah satu yang harus dibenahi adalah masalah aset di SKPD dan BUMD, karena BUMD juga merupakan bagian dari aset daerah.

"Untuk mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, kita berharap secepatnya keberhasilan itu, makanya temuan BPK harus segera dilakukan perbaikan, kita berusaha untuk mendapatkan predikat WTP, selain aset yang kita benahi, laporan 17 temuan BPK misalnya administrasi pembangunan dan sebagainya," kata Justiar.

Menurutnya, jika setiap temuan BPK itu diperbaiki dan dibenahi pasti mendapat predikat WTP. Artinya, setiap temuan BPK harus diperbaiki. "Kita akan berusaha untuk mendapatkan WTP, ada perubahan dari disclaimer dan tidak wajar ke WDP ini. Predikat terakhirnya adalah WTP dan WTP ini yang bagus, karena mendapat bonus Rp 100 miliar atas keberhasilan menata administrasi pemerintahan, penambahan APBD, bonus itu diberikan langsung oleh pemerintah pusat," tuturnya seraya menyampaikan bahwa selama 4 bulan melakukan pembenahan dari predikat disclaimer dan tidak wajar ke predikat WDP.

"Salah satu target dan fokus utama kita untuk melakukan pembenahan dalam menata administrasi pemerintahan, yang mana sebelumnya daerah kita masuk kategori zona merah, nanti kita lihat apakah daerah kita masuk zona aman, mudah-mudahan dari predikat WDP ini akan berubah menjadi WTP, dalam menata pemerintahan harus bersama-sama, misalnya ada kendala harus cepat diselesaikan. Inspektorat harus cepat menyelesaikannya, jangan ada lagi istilah belum melapor, inilah, itulah," urainya.

Namun disamping itu, Justiar juga mengakui kendala selama 4 bulan melakukan pembenahan dalam menata administrasi pemerintahan. Kendalanya itu adalah kurangnya komunikasi antar SKPD. "Laporan predikat Pekab Basel pada tahun 2015 lalu 318, dan kita tentunya optimis masuk ke zona aman yang saat ini masih disusun yang akan akan disampaikan ke BPKP serta ke Mendagri, kalau BPK itukan fokusnya ke keuangan," pungkasnya.

Terpisah, Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) yang membidangi pemerintahan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pekab Basel atas pendapatannya opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari opini disclaim. "Tentunya ini merupakan kerja keras kepala daerah bersama teamnya dalam mengembalikan opini LHP BPK menjadi WDP kembali. Dan kami ucapkan terimakasih atas capaian tersebut," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir Patholmuin ST, MM kepada wartawan yang mengakui sebenarnya DPRD sangat pesimis bisa mengembalikan opini LHP BPK menjadi WDP. Tetapi Pekab menjawab itu dengan keluarnya opini WDP walaupun dalam 8 material temuan yang harus diselesaikan yang merupakan masalah yang harus ditindaklanjuti.

"Dan kami mengharapkan tahun depan bisa diraih opini wajar tanpa pengecualian," kata Samsir menjelaskan bahwa 8 temuan material LHP BPK itu yang tahun 2014 lalu. Kalau yang tahun 2016, DPRD belum terima detailnya dan besok (Selasa) rapat pembahasannya. (tom)